

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

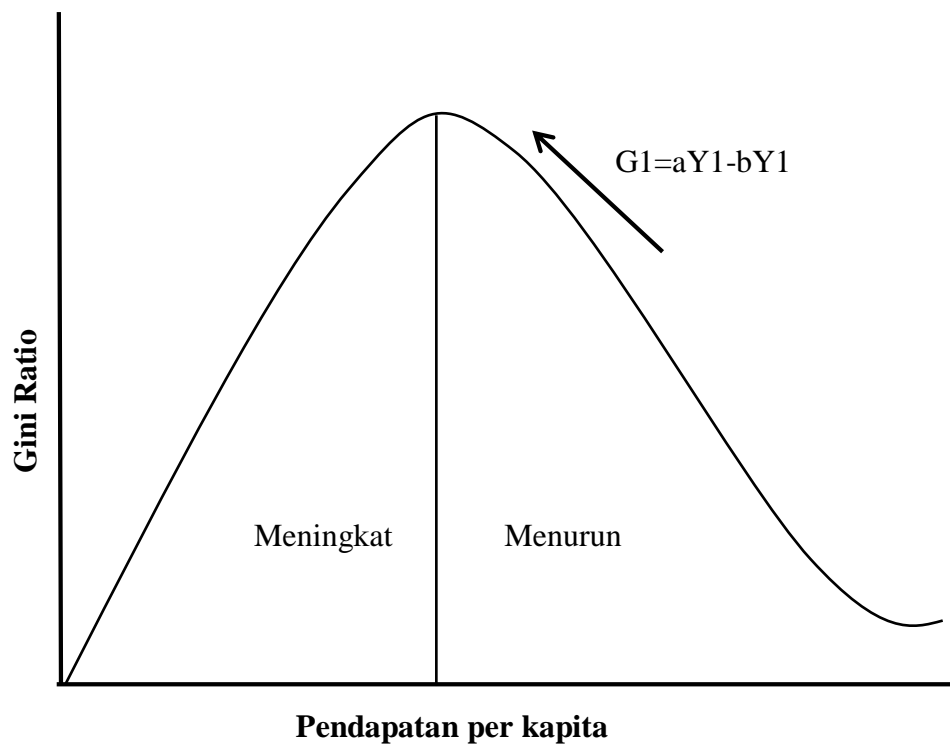
A. Landasan Teori

1. Konsep Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan yang tidak merata pada masyarakat disebut dengan ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya ketimpangan dipengaruhi atau ditentukan oleh tingkat pembangunan, heterogenitas etnis, dan kegagalan pemerintah dalam menghargai *property rights*. Perhatian pemerintah terhadap ketimpangan sangat diperlukan, karena ketimpangan wilayah yang ekstrim menyebabkan inefisiensi ekonomi, menambah jumlah kemiskinan dan pengalokasian asset yang tidak efisien. Ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang tentunya akan mahal.

Namun, pandangan itu ditentang Todaro (2000), bahwa distribusi pendapatan dapat berwujud pemerataan maupun ketimpangan, yang menggambarkan tingkat pembagian pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi. Distribusi dari suatu proses produksi terjadi setelah diperoleh pendapatan dari kegiatan usaha. Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara, baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan

faktor produksi. Kuznets membuat hipotesis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan membentuk kurva U-terbalik (*inverted-U curve*). Studi empiris yang dilakukan dengan menghitung dan menganalisis sejarah pertumbuhan ekonomi pada negara maju dalam jangka panjang. Hipotesa Kuznets bersandar pada asumsi bahwa terdapat dua sektor ekonomi dalam suatu negara, yaitu sektor pertanian tradisional di perdesaan dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang rendah dan sektor modern (sektor industri dan jasa) di perkotaan dengan pendapatan perkapita dan ketidakmerataan pendapatan yang tinggi.



Sumber : Damanhuri dalam Buku Kesenjangan Ekonomi

GAMBAR 2.2
Kurva Kuznets

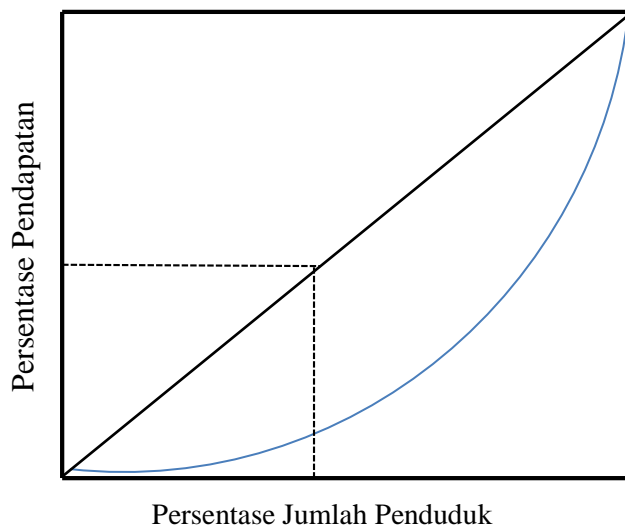
Kurva Kuznets menekankan adanya perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi, dimana dalam prosesnya sektor industri dan jasa cenderung berkembang dan terjadi pergeseran dari sektor tradisional ke sektor modern. Selama masa Ketidakmerataan meningkat Ketidakmerataan menurun Pendapatan Perkapita (Y) transisi tersebut, produktivitas dan upah tenaga kerja di sektor modern lebih tinggi daripada sektor tradisional, sehingga pendapatan perkapita yang diterima juga lebih tinggi, akibatnya ketidakmerataan pendapatan antara kedua sektor tersebut meningkat. Pada awal pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita masih rendah dan kesenjangan pendapatan yang juga rendah, kesenjangan pendapatan semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita.

2. Indeks Gini atau Rasio Gini

Indeks Gini (rasio gini) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Indeks Gini didapatkan dengan cara menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bmeujursangkar dimana kurva Lorenz tersebut berada (Arsyad, 2010). Bila Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk negara-negara yang ketimpangan distribusi pendapatannya

tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negaranegara yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Analisis distribusi pendapatan juga biasa digunakan dalam mengkaji kesenjangan, dengan menggunakan kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz karena yang memperkenalkan kurva Lorenz ialah Conrad Lorenz, seorang ahli statistika dari Amerika Serikat. Pada 1905, Kurva Lorenz menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.



Sumber: Damanhuri dalam Buku *Kesenjangan Ekonomi*

GAMBAR 2.2
Kurva Lorenz

Jumlah pendapatan digambarkan dalam sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak, tapi dalam bentuk persentase kumulatif. Misalnya, titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendahnya pendapatan), dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk paling rendah pendapatannya. Pada

ujung sumbu horizontal merupakan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.

Sumbu vertical menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen. Dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal itu menunjukkan persentase pendapatan yang diterima. Ini sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh, titik tengah dari diagonal tersebut benar-benar menunjukkan bahwa 50 persen pendapatan diterima oleh 50 persen jumlah penduduk, demikian juga titik 75 maupun 25. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan pemerataan sempurna (*perfect equality*). Oleh karena itu, garis tersebut biasanya juga disebut sebagai garis pemerataan sempurna.

Menurut Damanhuri (2017), semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal (pemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan. Keadaan yang paling ekstrem dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan yang mana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, hal tersebut akan ditunjukkan oleh berimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertical sebelah kanan.

3. Teori PDRB

- a. Wilayah Domestik dan Regional Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).
- b. Produk Domestik 30 Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri.
- c. Produk Regional Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk

regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.\

- d. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen- komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.
- e. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar
Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya (ausnya) barang-barang modal yang

terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

- f. Produk Domestik Regional Neto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor
- Perbedaan antara konsep biaya faktor dan konsep harga pasar, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lainlain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor.
- g. Pendapatan Regional Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional. Pendapatan Regional Perkapita Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah

penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu
Pendapatan Perkapita

Adapun untuk perhitungan PDRB adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pendekatan Produksi PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajian ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu :
 - i. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
 - ii. Pertambangan dan Penggalian
 - iii. Industri Pengolahan
 - iv. Listrik, Gas dan Air Bersih
 - v. Konstruksi
 - vi. Perdagangan, Hotel dan Restoran
 - vii. Pengangkutan dan Komunikasi
 - viii. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan
 - ix. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.
- b. Menurut Pendekatan Pendapatan PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel PDRB Per Kapita Menurut Badan Pusat Statistik (2017) angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Nilai PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Masyarakat dipandang mengalami peningkatan kemakmuran apabila pendapatan perkapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil menerus bertambah.

Pengertian PDRB menurut BPS yaitu nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi melalui unit-unit ekonomi dan waktu tertentu. Sementara itu, hasil dari kegiatan ekonomi melalui unit-unit ekonomi kemudian dibagi jumlah penduduk wilayah tertentu kemudian menghasilkan PDRB per kapita. Kegiatan ekonomi tersebut disumbang oleh sembilan sektor yaitu pertanian, perdagangan, industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, listrik dan gas serta air bersih, bangunan, restoran dan hotel, komunikasi dan pengangkutan, penyewaan dan keuangan serta jasa perusahaan dan jasa-jasa. Dalam perhitungan PDRB metode penghitungan ada dua macam. Pertama, menggunakan tahun berjalan sebagai acuan atau atas dasar harga berlaku. Kedua menggunakan tahun tertentu sebagai acuan atau atas dasar harga konstan.

Taharah(2018) PDRB Perkapita juga menjadi salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana kondisi disuatu wilayah dalam periode tertentu, dapat dilihat dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan atau atas harga berlaku. Jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan, otomatis akan mendorong naiknya tingkat daya beli atau konsumsi masyarakat. Ketika daya beli atau konsumsi masyarakat meningkat otomatis juga akan mendorong meningkatnya produksi barang dan jasa.

1.1. Hubungan PDRB Per Kapita dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dalam meningkatkan perekonomian disuatu wilayah perlu adanya kinerja yang baik dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Untuk mengukur kegiatan ekonomi disuatu wilayah PDRB dapat

menjadi salah satu indikator perhitungan, PDRB sendiri dapat diartikan sebagai hasil kinerja perekonomian suatu wilayah pada kurun waktu atau periode tertentu dapat digambarkan dengan menggunakan indikator makro ekonomi yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Hadi (2006), PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Sedangkan PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Untuk menjamin tercapainya

tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Produktivitas Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
- b. Pemerataan Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
- c. Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.
- d. Pemberdayaan Penduduk dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan.

Model pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat hal tersebut di atas. Terdapat beberapa alternatif tambahan yang dibutuhkan dalam

kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan social, politik sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan drajat pribadi dan jasmani hak-hak asasi manusia merupakan bagian dari model tersebut. Konsep pembangunan manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualits hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang dapat turut berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan pembangunan manusia, baik dalam konteks nasional maupun regional. Hal ini dianggap penting karena kebijakan sebuah pembangunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan berdampak pada proses pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengurangi disparitas antardaerah yang merupakan peroalan sulit bagi kebanyakan Negara berkembang terutama Negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi. (Brata, 2002).

Indeks pembangunan manusia ditujukan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, maka digunakanlah suatu indikator untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar penghitungan, yaitu angka harapan hidup ketika lahir pencapaian pendidiakam dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM

suatu Negara maupun daerah menunjukkan sejauh mana suatu Negara atau daerah mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu berupa angka harapan hidup 85 tahun., pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang capaian yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut.

Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan. Secara khusus, (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembanguna untuk hidup layak. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan ratarata lama sekolah.

Sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa, tidak dinilai dari modal fisik ataupun sumber daya material yang dimilikinya tapi dilihat dari factor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan social dan ekonomi bangsa tersebut (Todaro M. P., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, 1999). Sejarah mencatat bahwa Negara yang menerapkan patron pembangunan dengan perspektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktivitas factor produksi secara total dan menyeluruh. Karena tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami diminishing return tapi hal tersebut tidak berlaku pada ilmu pengetahuan. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*).

Nilai indeks IPM berkisar antara 0-100. Pengertian IPM 15 (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Sejak tahun 1990 UNDP mulai melakukan penelitian pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human development Index*) secara konsisten menerbitkan seri tahunan dalam publikasi yang berjudul *Human Development Report*, sebagai upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu Negara. Walaupun belum mampu mengukur semua aspek dari pembangunan, namun cukup mampu mengukur aspek pokok dari pembangunan manusia yang dinilai mampu menggambarkan status kemampuan dasar penduduk

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli.

- a. Angka harapan hidup Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yaitu anak lahir hidup dan anak masih hidup.
- b. Tingkat pendidikan Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah perse ntase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis.

Terdapat beberapa teori dalam pertumbuhan indeks pembangunan manusia regional, seperti:

- a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan perekonomian suatu Negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baikselama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menurut Sadono Sukirno (1985:19). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus diperbandingkan pendapatan

nasional dari berbagai tahun. Dalam perbandingan dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua factor yaitu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan dalam harga-harga. Menurut Todaro dalam Baeti (2012:92) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Menurut (Suryana dalam Endah Juwita, 2014:24) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

b. Teori Pertumbuhan klasik

Menurut Adam Smith sumber daya alam merupakan hal paling utama dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang ada merupakan batas maksimum bagi pertumbuhan ekonomis suatu daerah. Ketika sumberdaya yang tersedia belum digunakan sepenuhnya maka yang memiliki peranan untuk memberdayakan sumber daya tersebut adalah jumlah penduduk dan stok modal di suatu daerah. Sumber daya manusia memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi maka akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktifitas setiap penduduk akan

berkurang dan pada saat keadaan tersebut terjadi, maka kemakmuran masyarakat menurun.

Selanjutnya yaitu terdapat tiga komposisi indicator yang digunakan dalam mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu Negara dalam konsep Indeks Pembangunan manusia yaitu:

- a. Tingkat kesehatan diukur dengan melihat harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

3.1. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. IPM dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Williamson dengan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari nilai IPM. Taharah (2018) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital, yaitu bahwa

pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengurangi disparitas pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Jika IPM naik maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan sebaliknya jika angka IPM menurun maka ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaab milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah. PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak yang terdapat di kabupaten / kota terdiri dari:

- i. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
- ii. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.
- iii. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan

oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

- iv. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah.
- v. Pajak Reklame Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- vi. Pajak Penerangan Jalan pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang dimaksud penggunaan

tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

- vii. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
- viii. Pajak Parkir

b. Retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

- i. Retribusi jasa umum Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- ii. Retribusi jasa usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang,

bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

5.1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Ni Putu dan ketut, peran PAD yaitu sebagai sumber pendapatan dan pembiayaan pemerintah daerah. Karen merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan yang semakin besar antar daerahnya. Berdasarkan data BPS D.I Yogyakarta PAD provinsi D.I Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini memberikan pengaruh positif terhadap masing-masing daerah di provinsi D.I Yogyakarta, akan tetapi tingkat ketimpangan di masing-masing daerah masih sangat terlihat jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dan perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

3. Dana Alokasi Umum

Halim (2002) menyatakan: DAU adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DAU adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusan Presiden. Setiap provinsi/ kabupaten menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus / formulasi statistik yang kompleks antara lain dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Menurut Awaniz (2011: 19) Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU) Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat

memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- i. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
- ii. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
- iii. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- iv. Untuk meningkatkan keberterimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut: Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN. Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah

yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) Siregar (2016: 17) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

- i. Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
- ii. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

- iii. Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan 10 arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).
- iv. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
- v. Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- vi. Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat

sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

- vii. Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidakadilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

6.1. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

DAU merupakan bagian dari dana perimbangan yang juga mempunyai kontribusi paling besar dari total penerimaan daerah. DAU adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya. Dengan adanya DAU yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat. Pemberian DAU oleh pemerintah ini bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah. DAU dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan

asumsi bahwa DAU lebih digunakan untuk belanja pembangunan daripada belanja rutin. Alokasi DAU untuk belanja pembangunan memungkinkan sesuatu daerah untuk meningkatkan pendapatan yang akhirnya akan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain belanja pembangunan, belanja modal juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan ini memberikan pengaruh positif terhadap masing-masing daerah di provinsi D.I Yogyakarta, akan tetapi tingkat ketimpangan di masing-masing daerah masih sangat terlihat jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan dan perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis melampirkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti dari penelitian terdahulu agar dapat diketahui kelemahan atau kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan perbandingan atau acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Kajian pustaka sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi dan pembanding dalam penelitian ini sehingga dalam bab ini akan memberikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian Ketimpangan Ekonomi yang dilakukan oleh sejumlah peneliti di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang telah dilakukan oleh Amos dan Orley (2017) yang berjudul *Pertanyaan Mengenai Penyebab Meningkatnya Ketidaksetaraan Pendapatan di Amerika Serikat*. Variable yang digunakan yaitu Pendapatan Per kapita, dengan metode penelitian Pooled BEA data. Hasil yang diperoleh yaitu Kekurangan utama dari teori pertumbuhan regional yang ada, kegagalan inisiasi endogen dari proses pertumbuhan, dikoreksi dalam teori gelombang panjang. Teori gelombang panjang menunjukkan bahwa meningkatnya ketidaksetaraan Regional, terjadi setelah beberapa dekade penurunan, disebabkan oleh pola gelombang panjang yang dirangsang oleh inovasi produk. Proses gelombang spasial yang panjang dapat menjelaskan ketidaksetaraan antar negara dan intrastate dan menyiratkan pola ketidaksetaraan pendapatan internasional dan pertumbuhan yang tidak merata. Analisis teoritis lebih lanjut dan tes empiris jelas diperlukan untuk memvalidasi penjelasan ini meningkatkan ketidaksetaraan regional.

Berdasarkan penelitian Apriesta (2013) yang berjudul *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Studi Kasus Kabupaten di Jawa Tengah*. Variabel yang digunakan yaitu Desentralisasi Fiskal, Ratio Pajak Daerah, Pertumbuhan Populasi, Jumlah Tenaga Kerja. Metode penelitian ini adalah PLS (*Penel Least Square*). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal memberikan dampak yang positif dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan daerah untuk pembangunan daerah, dari hasil penelitian ini yang telah ditelaah dan diregresi dalam model Pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien sebesar 0.103294 mempunyai dampak positif

pada setiap kenaikan pertumbuhan yaitu dalam kenaikan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0.103294 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1 persen.

2. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi dalam model Pertumbuhan Ekonomi pajak daerah mempunyai nilai koefisien sebesar -0.995645 yang memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tetapi tidak signifikan

3. Dari penghitungan regresi 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, secara signifikan dengan nilai koefisien -0,481655 ternyata pertumbuhan populasi yang besar nantinya akan mengurangi nilai pertumbuhan ekonomi.

4. Faktor tenaga kerja mempunyai nilai signifikan terhadap meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu koefisien sebesar 2,96 yang berarti setiap kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 2,96 akan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen.

Penelitian dilakukan oleh Cingano (2014) yang berjudul Tren dalam ketidaksetaraan pendapatan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan variabel yaitu Hasil baseline, kebijakan redistributive, menggunakan metode estimasi. Dengan menggambar pada data harmonisasi yang mencakup negara OECD selama 30 tahun terakhir, analisis ekonometrik menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki dampak negatif dan signifikan secara statistik pada pertumbuhan berikutnya. Secara khusus, yang paling penting adalah kesenjangan antara rumah tangga berpenghasilan rendah dan seluruh penduduk.

Sebaliknya, tidak ada bukti yang ditemukan bahwa mereka dengan pendapatan tinggi menarik diri dari sisa populasi pertumbuhan merugikan. Analisis berdasarkan data mikro dari survei keterampilan dewasa (PIAAC) menunjukkan bahwa meningkatnya kesenjangan pendapatan menekan pengembangan keterampilan antara individu dengan latar belakang pendidikan orang tua yang lebih miskin, baik dari segi kuantitas pendidikan yang dicapai (misalnya tahun Pendidikan), dan dalam hal kualitas (yaitu kemampuan keterampilan). Hasil pendidikan individu dari latar belakang yang lebih kaya, namun, tidak dipengaruhi oleh ketidaksetaraan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2018) dengan judul Perbedaan pendapatan determinan di Propinsi Jawa Tengah setelah satu dasawarsa Pelaksanaan desentralisasi otonomi dan fiscal dengan variable Investasi, inflasi, upah minimum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan model *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan variabel investasi berdampak positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah, sementara variabel inflasi memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Selain itu, variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di Jawa Tengah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khairul (2018) yang berjudul Apakah ada hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan

ekonomi, ketidaksetaraan pendapatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model koreksi kesalahan panel vektor, dan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian adalah bahwa ada hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan dalam jangka panjang. Kedua, dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi positif dan tidak signifikan terkait dengan ketidaksetaraan pendapatan. Selain itu, ada kausalitas searah berjalan dari ketidaksetaraan pendapatan untuk pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017) dengan judul Pengaruh PDRB per kapita, Investasi, IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerahdi Provinsi DIY (2011-2015). Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB per kapita, Investasi, IPM. Metode yang digunakan adalah data panel dengan model *Fixed Effect Model*. Hasil yang diperoleh adalah seluruh variabel penelitian berpengaruh secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara investasi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian dilakukan Oleh Sari (2017) yang berjudul Analisisn factor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di pulau Sumatra tahun 2011-2015. Penelitian tersebut menggunakan variabel PAD, Inflasi dan UMR. Hasil uji koefisien determinan (R²) menunjukkan bahwa besarnya nilai R-square 0,390569, atau sebesar 39,06%. Artinya variasi ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada dalam model statistik seperti pendapatan asli daerah (PAD), inflasi (INF), dan upah minimum regional (UMR). Berdasarkan uji

validitas pengaruh (uji t) pada signifikansi (α) sebesar 0,10, variabel pendapatan asli daerah dan upah minimum regional memiliki berpengaruh negatif signifikan sedangkan variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera tahun 2011-2015.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samsir dan Rahman (2018) yang berjudul Menelusur Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten dan Kota. Dengan menggunakan variable Desentralisasi Fiskal, Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk, penelitian ini menggunakan metode ata panel yaitu model *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian ini menunjukkan selama periode penelitian 2010- 2015, terjadi ketimpangan pembangunan yang tidak cukup signifikan berdasarkan Indeks Williamson, sedangkan menurut Indeks entropi Theil, ketimpangan pembangunan boleh dikatakan kecil yang berarti masih terjadinya pemerataan pembangunan setiap tahunnya selama periode pengamatan. Sebagai akibatnya tidak terbuktinya hipotesis Kuznets di Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan adanya kurva U terbalik. Variabel desentralisasi fiskal, aglomerasi, tingkat pengangguran terbuka, IPM, dan jumlah penduduk, secara simultan berpengaruh terhadap disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Desentralisasi fiskal dan aglomerasi tidak berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka, IPM jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil dari penelitian Wahyu dan Mursinto (2015) yang berjudul Determinan pada pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Variable yang digunakan yaitu Investasi swasta, belanja modal, rasio modal manusia, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin (kemiskinan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan model *Fixed Effect Model*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Investasi swasta secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jawa Timur dengan jalur positif; Kedua, rasio belanja modal dipengaruhi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan jalur negatif; Ketiga, rasio modal manusia dengan proxy tingkat pendidikan menengah (SMP/SMA/SMA/SMK) dicapai oleh para pekerja berusia 15 dan di atas memiliki pengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan jalur positif; Keempat, pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan dengan jalur positif; Kelima, rasio modal manusia tidak secara signifikan mempengaruhi kesenjangan pendapatan dengan jalur negatif; Keenam, pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi kemiskinan dengan jalan negatif; dan terakhir; Ketujuh, kesenjangan pendapatan secara signifikan mempengaruhi kemiskinan dengan jalan hubungan positif.

Hasil akhir dari penelitian oleh Zulgani dan Rosmeli (2018) dengan judul penelitian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. Variable penelitian ini adalah Jumlah Penduduk yang Bekerja, penelitian ini menggunakan metode data panel. Hasil

yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Jumlah penduduk yang bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

C. Hipotesis

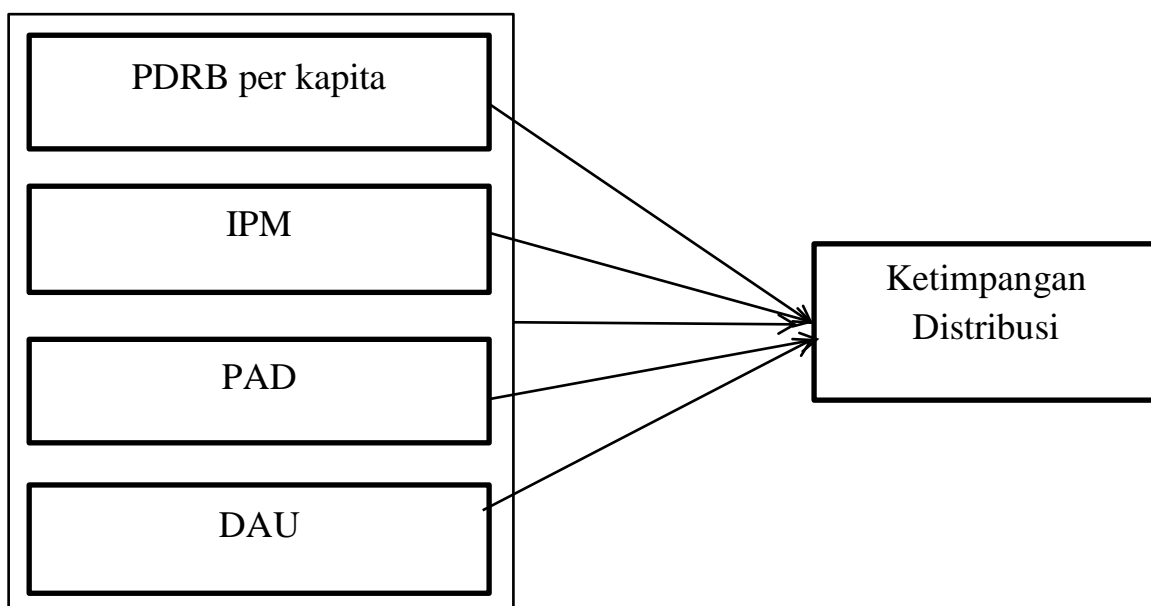
Dalam penelitian ini, analisis menggunakan asumsi sebagai berikut:

1. Diduga PDRB Per Kapita berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
2. Diduga IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
3. Diduga PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta
4. Diduga DAU berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

D. Model Penelitian

Penelitian ini menganalisis determinan ketimpangan ekonomi di DIY. Dalam penelitian ini akan menguji empat variabel. Variabel pertama yaitu PDRB Per

Kapita dapat diartikan sebagai representasi dari rata-rata kemakmuran penduduk selain itu juga dapat menjadi ukuran dari seberapa besar aktivitas ekonomi dari setiap penduduk. . Variabel kedua yaitu IPM per kapita yang merupakan representasi dari kualitas SDM di DIY yang terdiri dari beberapa komponen antara lain, angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan partisipasi daya beli. Selanjutnya Variabel selanjutnya yaitu PAD dan variabel yang keempat adalah DAU. PAD adalah representasi dari pendapatan asli daerah, masing-masing Kabupaten/ Kota. Sedangkan DAU sebagai representasi dan alokasi umum dari pemerintah untuk pembangunan.



GAMBAR 2.3.
Hubungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Variabel yang Mempengaruhinya.

